

**BAB 2**  
**KONDISI JAKARTA PADA MASA PEMERINTAHAN GUBERNUR ALI**  
**SADIKIN TAHUN 1966-1977**

**2.1 Profil Gubernur Ali Sadikin**

Ali Sadikin lahir di Sumedang, Jawa Barat 7 Juli 1927. Beliau memiliki 5 saudara laki-laki. Tahun 1954 beliau menikah dengan seorang dokter gigi bernama Nani Arnasih kemudian dikaruniai seorang anak laki-laki yaitu: Boy Bernadi, Eddy Trisnady, Irawan Hernadi, dan Benyamin Irwansyah. Tahun 1986 ibu Nani Sadikin meninggal dunia karena sakit dan tahun berikutnya 1987 Ali Sadikin menikah lagi dengan Linda Mangan, dari pernikahannya yang kedua mereka dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Yasser Umarsyah.

Pada masa pendudukan Jepang beliau mengenyam pendidikan di Sekolah Tinggi Pelayaran Semarang kemudian menjadi anggota BKR-Laut atau saat ini dikenal sebagai TNI-AL pada saat perang kemerdekaan. Beliau bertugas di Pangkalan Angkatan Laut dan Korps Marinir yang ada di Tegal Jawa Tengah, selain itu beliau ikut serta dalam perlawanan Agresi Belanda I dan II dan juga berperan penting dalam penumpasan PERMESTA di Sulawesi. (Prayitno R. d., 2004)

Ali Sadikin memiliki watak yang sangat keras dan tegas sehingga terlihat galak dan terkesan pemaarah akan tetapi bukan berarti dia seorang pembenci melainkan dia akan marah kepada orang yang melakukan kesalahan. Hal ini juga ditunjukkan pada saat ia menjabat menjadi Gubernur Jakarta beliau tidak segan

segar melontarkan kata-kata kasar seperti “tolol, sontoloyo, goblok” kepada stafnya yang memang dianggap bersalah. Meskipun begitu beliau juga sering memuji kepada bawahannya yang telah melaksanakan pekerjaannya dengan baik dan benar. (Prayitno R. d., 2004)

Beliau merupakan turunan tokoh terpandang di Sumedang, Ali Sadikin dan keenam saudara laki-lakinya merupakan seorang raden. Meskipun begitu orang tuanya tidak menyematkan nama raden dalam namanya hal ini dilakukan agar lebih merakyat. Pendidikan seperti ini diterapkan kepada anak-anaknya meskipun lahir dari golongan priyayi kedua orang tua Ali Sadikin menerapkan sikap peduli kepada masyarakat, dan selalu mengutamakan kepentingan orang banyak.

(Prayitno R. d., 2004) mengatakan bahwa Ali Sadikin mengenyam pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Sumedang dan dilanjutkan Sekolah Tinggi Pelayaran di Semarang kemudian dilanjutkan lagi keluar negeri dengan mengambil Advanced Course For Officer Of The marine Corp U.S.M.C School , USA.

Sebelum menjadi gubernur Jakarta, beliau mengawali karir di militer sebagai perwira TNI-AL dimulai tahun 1959-1977. Beliau menjabat sebagai Kepala Staf Operasi Korps Marinir Pangkalan IV di Tegal tahun 1945-1950. Kemudian menjadi kepala Korps Marinir pada Akademi Angkatan Laut tahun 1950-1954. (Ramadhan, 1992).

Tahun 1959-1963 beliau menjabat sebagai pembantu utama menteri/ Panglima Angkatan Laut. Tahun 1963-1966 menjabat sebagai Menteri

Perhubungan Laut Kabinet Kerja sekaligus Menteri Koordinator Kompartemen Maritim atau Menteri Perhubungan Laut Kabinet Dwikora dan Kabinet Dwikora yang disempurnakan. Selama menjadi TNI-AL beliau mendidik perwira untuk disiplin dan pantang menyerah dalam menghadapi lawannya. Pada saat menjadi Menteri beliau melakukan pembenahan manajerial dengan mereorganisasi dan mutasi jabatan secara periodik sehingga memberikan peluang dalam menduduki jabatan-jabatan terendah kepada staf-staf lainnya. Kemudian setelah menjadi Deputi Menteri Angkatan Laut Republik Indonesia beliau mengemban visi untuk kesejahteraan para prajurit dengan memfasilitasi perumahan.

Ali Sadikin diangkat menjadi Gubernur DKI Jakarta tanggal 28 april 1969 oleh Presiden Soekarno kemudian terpilih kembali untuk periode selanjutnya pada tanggal 14 Februari 1972 di ruang sidang DPR-RI. Keputusan Soekarno dalam menunjuk Ali Sadikin untuk menjadi Gubernur Jakarta karena dianggap mampu melakukan perubahan bagi Jakarta yang pada saat itu keadaannya sangat carut marut dan membutuhkan sosok yang tegas dalam memimpin kemudian Ali Sadikin mampu melayani para diplomat, disamping itu Ibu Nani Sadikin dianggap mampu membantu suaminya dalam mengemban tugs sebagai Gubernur Dki Jakarta dengan dapat berkomunikasi dan mendampingi para istri dan keluarga Diplomat serta Duta Besar dengan baik. (Prayitno R. d., 2004)

Ali Sadikin dianggap paling mudah meledak emosinya akan tetapi selalu teguh pada pendirian. Hal ini sering mengejutkan para staf dan aparatnya meskipun tidak mengenal jabatan akan tetapi sifat tersebut tidak mengurangi kesetiaannya kepada tugas yang diembannya. Kelebihan Ali Sadikin adalah

kemampuannya yang tidak hanya memusatkan perhatian pada masalah-masalah pemerintahan kota Jakarta saja, akan tetapi pada seluruh permasalahan kehidupan di ibukota republik Indonesia. Ali Sadikin terus-menerus selama dua kali masa jabatannya memberikan perhatian penuh pada berbagai masalah, keperluan, kesulitan, dan sebagainya, baik yang bersifat kepentingan umum maupun kepentingan nasional, serta memperhatikan pribadi-pribadi anggota masyarakat, dan juga meliputi penghidupan seni dan budaya, pendidikan, olah raga, dan berbagai hal lain yang biasanya luput dari perhatian pejabat-pejabat tinggi pemerintah, yang membatasi diri pada tugasnya saja.

Ada beberapa alasan dipilihnya Ali Sadikin diangkat menjadi gubernur DKI Jakarta oleh Presiden Soekarno yaitu: *Pertama*, Jakarta merupakan kota pelabuhan kemudian dipilihnya salah seorang dari Angkatan laut dianggap cocok dalam memimpin. *Kedua*, Ali Sadikin dianggap mampu menghadapi Diplomatic Corps. *Ketiga*, setelah terjadinya peristiwa G30-S Angkatan Laut merupakan salah satunya yang tetap loyal kepada Presiden Soekarno. (Abeyasekere, 1989)

Sebagai tokoh yang memiliki integritas dan akuntabilitas, Ali Sadikin memiliki beberapa penghargaan diantaranya:

1. Piagam tanda kehormatan Bintang Mahaputra Utama
2. Piagam Penghargaan Krida Bakti
3. Surat Penghargaan dan Lencana Cikal Bakal TNI-AL
4. Piagam Penghargaan dari PERSI
5. Penghargaan dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
6. Piagam Sarwono dari Lipi

7. Piagam Anugrah Cipta Utama
8. Penghargaan Bintang Anugrah Mahaputra Utama
9. Anugrah Pena Emas Wartawan Seluruh Indonesia
10. Piagam Penghargaan dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia
11. Piagam Penghargaan dari Komite Nasional Olahraga Indonesia
12. Tanda Penghargaan Penanggulangan Bahaya narkoba
13. Piagam Penghargaan dari dewan Pengurus Yayasan Lembaga Bantuan Hukum

Selasa 20 Mei 2008, Ali Sadikin meninggal dunia di Singapura tepatnya di Rumah Sakit Gleneagles pukul 17.30 WIB setelah dirawat selama sebulan karena sakit.

## **2.2 Kondisi Jakarta Pada Masa Pemerintahan Gubernur Ali Sadikin**

Luas Jakarta pada awal pemerintahan Gubernur Ali Sadikin adalah 577 km<sup>2</sup> dan pada tahun 1977 luas wilayahnya 637,44 km<sup>2</sup> termasuk kepulauan seribu. Hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1974 tanggal 28 Desember 1974 tentang perubahan batas wilayah DKI Jakarta, kawasan administratif Jakarta yaitu 94° 45' / 94° 05' bujur timur 0°68'/11'15' lintang selatan. Sebagian besar pantai utara merupakan rawa-rawa, tinggi tanah diwilayah selatan kurang lebih 50m diatas permukaan laut sedangkan bagian utara 7 meter diatas permukaan laut. Wilayah selatan Banjir Kanal relatif berbukit dan keadaan tanah sedikit curam sedangkan daerah Banjir Kanal kearah bagian laut keadaan tanahnya rata. (Ali Sadikin, 1997)

Pada awal pemerintahan Gubernur Ali Sadikin Tahun 1966 berbarengan dengan adanya suatu peristiwa G30-S yang pada saat itu situasi kondisi politik Indonesia sedang memanas hal ini banyak terjadi perubahan yang mengakibatkan kondisi ekonomi, sosial masyarakat Indonesia memburuk begitu pula terjadi di Jakarta. Pelaksanaan pembangunan di Jakarta pada saat itu sedang tidak mendukung dikarenakan tingginya inflansi, kemudian naiknya harga bahan-bahan pokok yang mengakibatkan ekonomi melemah. (Notosusanto, 1981)

Iklim politik saat pengangkatan Ali Sadikin sebagai gubernur Jakarta diwarnai sikap saling mencurigai sama halnya ketika terjadi suatu masa peralihan dalam suatu pemerintahan. Kemudian kekosongan kepemimpinan daerah dan dualisme dalam pemerintahan berakibat hilangnya wibawa dalam suatu pemerintahan.

Jakarta saat itu dihadapkan pada ketidakseimbangan antara perkembangan sarana prasarana kota dengan kebutuhan hidup masyarakat. Lemahnya tata kelola pemerintahan mengakibatkan lemahnya pelayanan kepada masyarakat. Jakarta saat itu mengalami krisis dan tidak stabil. Terjadinya arus urbanisasi mengakibatkan pertumbuhan penduduk yang sangat cepat ini kemudian menjadi masalah antara perkembangan fisik kota dengan kebutuhan penduduk. Terjadinya kepadatan penduduk memaksa pemerintah untuk melakukan penataan ulang kota akan tetapi masalah lain datang dari penduduk itu sendiri, masyarakat justru sebagian besar memiliki penghasilan yang sangat rendah. Hal ini mengakibatkan percepatan tata ruang kota menjadi terhambat.

Tahun 1966, jalanan di Jakarta memiliki kualitas rendah dan minimnya pemeliharaan yang mengakibatkan kerusakan parah. Jalanan yang sempit membuat panjang jalan tidak dapat menampung lalu lintas kendaraan. Jumlah kendaraan saat itu mencapai 160.000 buah sedangkan panjang jalan kurang lebih 800 km.

Masalah lain pada saat itu yaitu masalah air tanah kemudian banjir yang selalu melanda Jakarta merusak jalan-jalan. Dengan banyaknya perbaikan serta pembuatan jalan dengan kualitas yang khusus tahan terhadap banjir membuat pembiayaan menyerap sangat banyak akan tetapi saat itu anggarannya sangat terbatas.

Edy sedyawati dalam iman Hilman menyebutkan pemerintahan Ali Sadikin telah melaksanakan rehabilitasi jalan ekonomi sepanjang 317 km, normalisasi dan peningkatan mutu jalan ekonomi sepanjang 200 km serta 3500 km untuk pembuatan jalan ekonomi baru. Perbaikan jalan lingkungan sepanjang 635 km kemudian pembuatan serta perbaikan jembatan beton sebanyak 93 buah.

Arus urbanisasi mengakibatkan adanya tekanan penduduk yang pesat menjadikan lingkungan hidup baru yang tidak sesuai dengan planologi juga tidak mengindahkan terhadap keselamatan dan kesehatan masyarakat. Kondisi ini sangat jauh dari kualitas wajar kondisi sosial ekonomi masyarakat Jakarta.

60% penduduk Jakarta masih hidup di lingkungan yang buruk banyak diantaranya mereka bermukim dipertkampungan kumu, kehidupan yang tidak sehat, kurang layak dan tidak produktif terpaksa mereka jalani. (BAPPEM, 1976)

Jakarta dituntut oleh pemerintah DKI Jakarta pada masa pemerintahan Gubernur Ali Sadikin menjadi ibukota metropolitan, hal ini berpengaruh pada kesempatan kerja yang lebih banyak di Jakarta, Jakarta menjadi pusat perdagangan, perekonomian, industri dan pusat lainnya. Pertambahan jumlah penduduk yang terus meningkat tanpa menambah sarana prasarana termasuk kebutuhan utama penduduk berupa tempat tinggal mendorong masyarakat dari daerah lain untuk datang ke Jakarta yang sebelumnya sudah padat. Hal ini menjadikan permasalahan bagi kota Jakarta setiap tahunnya. (Singarimbun, 1977)

Arus urbanisasi ini dilakukan sebagian masyarakat desa yang memiliki ekonomi rendah dengan pendapatan yang sangat kecil, tingkat pendidikan rendah, tenaga kasar menjadi modal utama dalam mencari penghasilan. Proses pembangunan Jakarta sangat tidak berimbang dengan pembangunan kehidupan pedesaan dan kota-kota kecil lainnya di Jakarta. Kesulitan yang dihadapi di pedesaan memaksa mereka untuk pergi ke kota-kota besar. Konsekuensi dari perpindahan tersebut terjadi ketidakseimbangan antara pembangunan dan fasilitas kota dengan jumlah penduduk yang terus berkembang pesat. Kemudian hal ini menjadikan lahirnya masyarakat gelandangan di Jakarta. (Darrundono, 1988)

Ali Sadikin berusaha membuat Kota Jakarta menjadi kota besar yang dapat sejajar dengan kota besar lainnya di dunia lebih khusus lagi di Asia. Banyak hal yang harus dipersiapkan untuk menjadi kota besar, yaitu sarana prasarana harus memadai seperti mendukungnya alat transportasi, gedung pemerintahan, kantor, perhotelan, sarana olah raga, pusat kesehatan begitupula dengan tempat-tempat



rekreasi yang berhasil dibangun oleh Ali Sadikin seperti Taman Impian Jaya Ancol, Taman Ismail Marzuki, Taman Mini Indonesia Indah. (Ramadhan, 1992)

Jakarta berperan sebagai pelopor pembaharuan, kemudian ini dijadikan Ali Sadikin dijadikan falsafah dalam membangun kota Jakarta. Pada masa pemerintahannya terdapat perubahan struktur organisasi pemerintah DKI Jakarta yang menjadikan beliau sebagai Gubernur kepala daerah, menjadi penguas tunggal eksekutif daerah mulai dari kelurahan, kecamatan, sampai walikota langsung dibawah oleh Ali Sadikin.

Keadaan tersebut dimanfaatkan oleh Ali Sadikin untuk membuat kota Jakarta menjadi pusat perekonomian Nasional dengan mengembangkan anggaran biaya baik yang bersumber dari pendapatan sendiri maupun subsidi dari pemerintah pusat. Usaha dalam pembangunan Jakarta, beliau melibatkan berbagai instansi karena dalam setiap pembangunan sering berbenturan dengan nilai, norma dan adat istiadat oleh karena itu Ali Sadikin mengerahkan Angkatan Bersenjata dalam hal pengamanan pembangunan kota.

Rencana Induk Jakarta tahun 1965-1985 yang mengabarkan pembangunan Jakarta 20 tahun mendatang, menjadikan Jakarta sebagai Ibukota Negara dan Kota Internasional. Namun disamping itu banyak masalah yang harus dihadapi seperti kebersihan kota, pemukiman, masalah lalu lintas, masalah tanah, sampah, banjir, kemacetan, arus urbanisasi, fasilitas kota, dan masalah lainnya yang harus dipecahkan.

Penerapan Rencana Induk memiliki fungsi lain. Setiap tanah yang berada di wilayah kota Jakarta diatur dan diarahkan kedalam pembangunan kota. Kebijakan ini berprinsip atas dasar bahwa setiap tanah yang digusur harus diarahkan sebagai kebijakan lingkungan yang diperuntukan perpetakan dan zoning yang telah ditetapkan dalam rencana kota. Tahun 1971 dibentuk Dinas Tata Kota hal ini dilakukan agar dapat memecah berbagai masalah mengenai pembangunan fisik di Jakarta. Dinas ini merupakan pengembangan bagian tata kota dari Dinas Pekerjaan Umum yang bertugas mengadakan pengawasan dalam pengelolaan tanah dan penertiban teknis. Secara yuridis administrasi mengenai izin penunjukan penggunaan tanah untuk *real estate* dan hal lain yang berhubungan dengan kegunaan persil-persil tanah. (Ali Sadikin, 1997)

Gemerlap kota Jakarta yang disuguhi oleh kerlap-kerlip lampu dijalan, pemukiman hingga perumahan membuat daya tarik tersendiri bagi masyarakat luar daerah untuk datang ke Jakarta. Berbagai aktivitas yang dijalankan mulai dari siang hari hingga malam hari. Terdapat banyak restoran, club malam, tempat perjudian, tempat prostitusi seperti Keramat Tunggak selalu ramai digandrungi banyak orang. (Ali Sadikin, 1997)